

# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEUANGAN DAERAH



## RENCANA KERJA TAHUN 2021



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 ini memuat program kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2019, program kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2020 serta Rencana Kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 mendatang dengan mengakomodir kebutuhan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkup Provinsi Jambi Sehingga dapat menunjang Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sesuai yang tertuang dalam RPJMD serta menjadi pedoman perangkat daerah maupun *stakeholder* yang membutuhkan.

Demikian, semoga Rancangan Rencana Kerja ini dapat memberikan dukungan terhadap Peran dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, terima kasih.

Jambi, Maret 2021

**KEPALA BADAN**

**AGUS PIRNGADI,S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 196912151990031005**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Maksud dan tujuan..... 3
1.3	Landasan Hukum..... 4
1.4	Sistimatika Penyusunan..... 5
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra.....7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah..... 22
2.3	Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakeuda...28
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional ..... 30
3.2	Tujuan dan Sasaran.....31
3.3	Program dan Kegiatan Tahun 2019..... 32
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 37</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



---

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Program Kerja dan Kegiatan Bakeuda.....	10
Tabel 2.2. Realisasi Belanja langsung dan tak langsung.....	20
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Tahun 2017-2019.....	23
Tabel 2.4 Kategori Mutu Pelayanan.....	25
Tabel 2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).....	26-27
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran.....	31
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Kerja Program Bakeuda.....	39



---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang disusun oleh perangkat Daerah yang berisi lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Program dan kegiatan pembangunan daerah harus diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan, mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan bangsa, meningkatkan produktifitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memelihara dan meningkatkan kualitas hidup.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan .Perencanaan merupakan penentuan tujuan yang ingin di capai . Dengan kata lain Perencanaan adalah suatu konsep dinamis dan fleksibel tentang persoalan masa depan, yang intinya memuat beberapa pilihan atau alternative program prioritas, optimalisasi alokasi sumberdaya yang tersedia dan efesiensi.

Dalam suatu progres kegiatan pencapaian tujuan yang telah di tentukan, dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna, apabila fungsi-fungsi dari management seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perencanaan sebagai salah satu dari fungsi management memiliki fungsi yang sama strategis nya dibandingkan dengan fungsi-fungsi management yang lainnya. Karena Perencanaan dapat di jadikan sebagai alat yang tepat untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu perencanaan suatu kegiatan menjadi sangat penting, karena kita dihadapkan pada suatu kondisi dimana kebutuhan yang di



inginkan tidak terbatas, sementara sumber daya yang ada ( sumber daya alam, sumber daya buatan dan SDM ) terbatas, sehingga kita harus memilih beberapa alternative dan skala prioritas. Bila kita dihadapkan dengan kondisi yang demikian itu, maka perencanaan mutlak untuk dijadikan sebagai bahan mencapai tujuan. Ada 3 (tiga) ciri-ciri perencanaan yang baik yaitu :

1. Perencanaan harus bersifat rasional, yaitu perencanaan dibuat berdasarkan pemikiran dan perhitungan secara cermat, logis dan dapat di operasionalkan.
2. Perencanaan bersifat fleksibel, berarti luwes, dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Perencanaan bersifat kontinyu, artinya perencanaan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Untuk mewujudkan realita pembangunan yang terarah, tepat sasaran, rasional, akomodatif, berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat/anggota, maka perlu diadakan perencanaan yang di mulai dari bawah ( bottom up) atau dikenal dengan perencanaan partisipatif yaitu perencanaan dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga hasil pembangunan yang kita laksanakan dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak dan anggota organisasi.

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh stakeholders. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian



diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi melalui proses dan tahapan (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan

Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang dan selanjutnya disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sesuai dengan kewenangannya

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai pedoman dan rumusan dalam menentukan arah kebijakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi dalam menunjang program pembangunan Kepala Daerah sehingga terjadi Sinergisitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai hasil yang terukur sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan yang ada .



### 1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2009 tentang RPJP 2005-2025;

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakeuda

##### Bab III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021



---

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Lampiran



---

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun lalu diperlukan sebagai bahan penyusunan Renja tahun 2021. Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan tahun lalu, sebagian besar sudah dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, adapun program kerja dan kegiatan yang terdapat di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi untuk tahun Anggaran 2019 melaksanakan 7 **program** untuk memenuhi 3 **sasaran stratejik**. Antara lain :

1. **Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran**
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**
6. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**
7. **Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota**



Untuk melaksanakan semua program dan kegiatan disediakan anggaran sebesar Rp. **50.018.112.700,00,-** yang terdiri dari :

No	Nama Program	Pagu Anggaran
1	Program Admintrasi Pelayanan Perkantoran	Rp. 7.640.061.458,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 21.101.262.326,-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 186.000.000,-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 133.190.092,-
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 332.475.000,-
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 19.475.661.524,-
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1.149.462.300,-
	<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp. 50.018.112.700,-</b>

dengan realisasi **Rp. 43.582.384.541,00,-** atau sebesar **87,13 %**. Sasaran pembangunan yang berhasil dicapai adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional sesuai dengan bidang pekerjaannya;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, ;
4. Terselenggaranya koordinasi antara Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dengan beberapa Dinas di Provinsi lainnya;

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi terdapat 7 (tujuh) program pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Selama tahun 2019 telah diupayakan pelaksanaan program tersebut.

secara keseluruhan tingkat pencapaian program dan kegiatan 87,13 % dalam arti semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .



Adapun tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

***Tujuan Strategis***

1. Meningkatkan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran, kualitas kelembagaan, tata laksana dan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabilitas dan partisipatif.
3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

***Sasaran Strategis***

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari seluruh Program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2019 , berdasarkan hasil evaluasi kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, program dan kegiatan tersebut terlihat dan tergambar dalam table 2.1, sedangkan realisasi Belanja langsung dan tidak langsung tergambar pada table 2.2 berikut :



**Tabel 2.1 Capaian Program Kerja dan Kegiatan Bakeuda**

KODE	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Perangkat Tahun 2021	Capaian Renstra Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-2) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Th.	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Kegiatan:										
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	1501 Surat		1405 Surat	1501 Surat	1501 Surat	100%			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11 Kantor		11 Kantor	11 Kantor	11 Kantor	100%			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	63 ASN		45 ASN	60 ASN	63 ASN	100%			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%			
	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis kantor	90%		90%	90%	90%	100%			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan	90%		90%	90%	90%	100%			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	5 Komponen		5 Komponen	5 Komponen	5 Komponen	100%			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 bahan Bacaan		5 bahan Bacaan	5 bahan Bacaan	5 bahan Bacaan	100%			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Tamu	500 Tamu		500 Tamu	500 Tamu	500 Tamu	100%			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi	50 Koordiansi		50 Koordiansi	50 Koordiansi	50 Koordiansi	100%			
	<b>Program Peningkatan Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
	Kegiatan:										
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung kantor	4 Perencanaan		4 Perencanaan	4 Perencanaan	4 Perencanaan	100%			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Pengadaan peralatan gedung kantor	90%		90%	90%	90%	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	300 kendaraan		300 kendaraan	300 kendaraan	300 kendaraan	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	93%		93%	93%	93%	100%			
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	11 Kantor		11 Kantor	11 Kantor	11 Kantor	100%			
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>										
	Kegiatan:										
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	280 Stel		280 Stel	280 Stel	280 Stel	100%			







				<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>								
				Kegiatan:								
				Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	11 kab/Kota	11 kab/Kota	11 kab/Kota	11 kab/Kota	100%		
				Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Perhitungan APBD Kab/Kota	Jumlah SK Gubernur Tentang Pembinaan dan Evaluasi Perhitungan APBD Kab/Kota	11 kab/Kota	11 kab/Kota	11 kab/Kota	11 kab/Kota	100%		



**Tabel 2.2 Realisasi Belanja lansunda dan tak lansunda**

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp
		APBD MURNI Rp	PERUBAHAN Rp	JUMLAH TOTAL Rp	REALISASI KEUANGAN		FISIK(%)	
					Rp	%	REAL	
<b>Badan Keuangan Daerah</b>								
<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>6.727.937.458</b>	<b>912.124.000</b>	<b>7.640.061.458</b>	<b>7.198.948.683</b>	<b>9,42</b>	<b>100</b>	<b>441.112.775</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	91.000.000	-	91.000.000	87.565.000	9,62	100	3.435.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.885.578.224	-	2.885.578.224	2.631.793.765	9,12	100	253.784.459
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	544.845.550	149.124.000	693.969.550	678.012.300	9,77	100	15.957.250
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	275.309.400	140.000.000	415.309.400	412.993.518	9,94	100	2.315.882
5	Penyediaan alat tulis kantor	522.670.584	78.000.000	600.670.584	599.005.568	9,97	100	1.665.016
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.169.758.000	195.000.000	1.364.758.000	1.217.325.300	8,92	100	147.432.700
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	108.615.700	-	108.615.700	107.909.830	9,94	100	705.870
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.360.000	-	30.360.000	30.360.000	100,00	100	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	199.800.000	-	199.800.000	184.408.700	9,23	100	15.391.300
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	900.000.000	350.000.000	1.250.000.000	1.249.574.702	9,997	100	425.298
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>19.707.262.326</b>	<b>1.394.000.000</b>	<b>21.101.262.326</b>	<b>17.328.851.994</b>	<b>8,21</b>	<b>8521</b>	<b>3.772.410.332</b>
1	Pembangunan gedung kantor	3.100.000.000	220.000.000	3.320.000.000	198.812.000	5,99	599	3.121.188.000
2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	7.475.000.000	186.000.000	7.661.000.000	7.641.246.761	9,97	100	19.753.239
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.485.036.816	988.000.000	6.473.036.816	6.053.740.235	9,35	100	419.296.581
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.210.181.600	-	1.210.181.600	1.076.489.458	8,90	100	133.692.142
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	433.250.000	-	433.250.000	383.487.310	8,85	100	49.762.690
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2.003.793.910	-	2.003.793.910	1.975.076.230	9,86	100	28.717.680
<b>3. Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>186.000.000</b>	<b>-</b>	<b>186.000.000</b>	<b>181.615.170</b>	<b>9,76</b>	<b>100</b>	<b>4.384.830</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	186.000.000	-	186.000.000	181.615.170	9,76	100	4.384.830
<b>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>133.190.092</b>	<b>-</b>	<b>133.190.092</b>	<b>108.459.475</b>	<b>8,14</b>	<b>100</b>	<b>24.730.617</b>
1	Pendidikan dan pelatihan formal	133.190.092	-	133.190.092	108.459.475	8,14	100	24.730.617
<b>5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>226.475.000</b>	<b>106.000.000</b>	<b>332.475.000</b>	<b>322.055.030</b>	<b>9,69</b>	<b>100</b>	<b>10.419.970</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	107.391.000	106.000.000	213.391.000	204.689.800	9,59	100	8.701.200
2	Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	119.084.000	-	119.084.000	117.365.230	9,86	100	1.718.770
<b>6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>18.379.672.824</b>	<b>1.095.988.700</b>	<b>19.475.661.524</b>	<b>17.429.470.712</b>	<b>8,95</b>	<b>9562</b>	<b>2.046.190.812</b>
1	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	3.583.000.000	-	3.583.000.000	2.624.605.400	7,33	8195	958.394.600
2	Kegiatan Penatausahaan Anggaran Belanja Tidak Langsung	333.042.000	-	333.042.000	313.241.048	9,41	100	19.800.952
3	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	704.610.978	-	704.610.978	643.750.550	9,14	9433	60.860.428
4	Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	439.043.448	30.000.000	469.043.448	451.522.186	9,63	100	17.521.262
5	Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akutansi Wilayah	142.777.600	-	142.777.600	141.900.700	9,94	100	876.900
6	Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Tidak Langsung	482.003.050	-	482.003.050	462.580.050	9,60	100	19.423.000
7	Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	164.418.500	131.841.200	296.259.700	295.746.872	9,98	100	512.828
8	Kegiatan Pengelolaan Admnistrasi TUKD Belanja Langsung	353.442.850	-	353.442.850	350.920.970	9,93	100	2.521.880
9	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan	6.711.584.000	-	6.711.584.000	6.184.832.992	9,22	9955	526.751.008



**Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Jambi**

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp.
		APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK(%)	
					Rp.	%	REAL	
10	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	405.470.000,00	0	405.470.000,00	398.865.950,00	98,37	100,00	6.604.050,00
11	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK Provinsi Jambi	242.608.800,00	0	242.608.800,00	239.839.084,00	98,86	100,00	2.769.716,00
12	Kegiatan Administrasi TP - TGR	185.311.798,00	76.357.500,00	261.669.298,00	246.091.839,00	94,05	100,00	15.577.459,00
13	Kegiatan Pengelolaan Akutansi Pendapatan	97.182.300,00	0	97.182.300,00	89.775.493,00	92,38	100,00	7.406.807,00
14	Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan Lain - lain Daerah	243.280.000,00	0	243.280.000,00	224.693.140,00	92,36	100,00	18.586.860,00
15	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Retribusi Daerah	353.580.000,00	0	353.580.000,00	250.129.866,00	70,74	70,74	103.450.134,00
16	Kegiatan Pemeliharaan Sistem Ke - Samsatan pada UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	507.788.000,00	50.000.000,00	557.788.000,00	555.570.822,00	99,60	100,00	2.217.178,00
17	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bidang Penganggaran Daerah	211.485.500,00	0	211.485.500,00	176.780.717,00	83,59	84,87	34.704.783,00
18	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tanjab Barat	256.796.000,00	76.819.000,00	333.615.000,00	302.321.850,00	90,62	100,00	31.293.150,00
19	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tanjab Timur	256.796.000,00	76.819.000,00	333.615.000,00	298.912.100,00	89,60	100,00	34.702.900,00
20	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Muaro Jambi	256.996.000,00	76.819.000,00	333.815.000,00	309.948.000,00	92,85	100,00	23.867.000,00
21	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Batanghari	317.596.000,00	76.819.000,00	394.415.000,00	366.002.100,00	92,80	100,00	28.412.900,00
22	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tebo	273.200.000,00	76.819.000,00	350.019.000,00	329.800.500,00	94,22	100,00	20.218.500,00
23	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Bungo	278.200.000,00	81.819.000,00	360.019.000,00	343.394.350,00	95,38	100,00	16.624.650,00
24	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Merangin	314.000.000,00	81.819.000,00	395.819.000,00	372.203.500,00	94,03	100,00	23.615.500,00
25	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Sarolangun	263.200.000,00	76.819.000,00	340.019.000,00	318.094.500,00	93,55	100,00	21.924.500,00
26	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Kerinci	263.000.000,00	83.419.000,00	346.419.000,00	314.418.100,00	90,76	100,00	32.000.900,00

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp.
		APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK(%)	
					Rp.	%	REAL	
27	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Jambi	293.300.000,00	99.819.000,00	393.119.000,00	391.199.833,00	99,51	100,00	1.919.167,00
28	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah	445.960.000,00	0	445.960.000,00	432.328.200,00	96,94	100,00	13.631.800,00
<b>7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>		<b>1.149.462.300,00</b>	<b>0</b>	<b>1.149.462.300,00</b>	<b>1.012.983.477,00</b>	<b>88,13</b>	<b>100,00</b>	<b>136.478.823,00</b>
1	Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	679.969.600,00	0	679.969.600,00	548.505.277,00	80,67	100,00	131.464.323,00
2	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Perhitungan APBD Kab/Kota	469.492.700,00	0	469.492.700,00	464.478.200,00	98,93	100,00	5.014.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>46.510.000.000,00</b>	<b>3.508.112.700,00</b>	<b>50.018.112.700,00</b>	<b>43.582.384.541,00</b>	<b>87,13</b>	<b>92,06</b>	<b>6.435.728.159,00</b>



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas , Badan Keuangan Daerah provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, bendahara umum daerah (BUD) dan sistem informasi keuangan daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang Tugasnya

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel capaian indicator utama sebagai berikut :



Tabel..2. 3. Capaian Indikator Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian kinerja
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tranparansi dan akutanbilas kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Audit BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	100%	100%
		Persentase Kab/Kota yang mendapat WTP	100%	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Porsi PAD terhadap Penerimaan Daerah	5%	-0,88%
		Skor IKM	80	81,05
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akutabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akip	62	41,55

Dalam pengukuran kinerja transparansi dan akutabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tahun 2019 akan digambarkan dengan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan table sebagai berikut :

Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2017-2019

No	KABUPATEN	CAPAIAN KINERJA 2017	CAPAIAN KINERJA 2018	CAPAIAN KINERJA 2019
1	2	3	4	5
	KOTA JAMBI	WTP	WTP	WTP
	MUARO JAMBI	WTP	WTP	WTP
	BATANG HARI	WTP	WTP	WTP
	TANJUNG JABUNG BARAT	WDP	WTP	WTP
	TANJUNG JABUNG TIMUR	WTP	WTP	WTP
	BUNGO	WDP	WTP	WTP
	TEBO	WTP	WTP	WTP
	SAROLANGUN	WTP	WTP	WTP
	SUNGAI PENUH	WTP	WTP	WTP
	KERINCI	WTP	WTP	WTP
	MERANGIN	WTP	WTP	WTP
	JUMLAH PERSENTASE.....	81,81 %	100 %	100%



Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja untuk tahun 2017-2019, hasil perbandingan tersebut diperoleh opini dan persentase pencapaian target, berdasarkan tabel di atas indikator dicapai opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Jambi dimana opini BPK Perwakilan Provinsi Jambi dari Tahun 2017 sebanyak 7 Kabupaten memperoleh Opini WTP dan 2 Kabupaten memperoleh WDP dengan persentase sebesar 81,81% sedangkan pada tahun 2018 dan 2019, seluruh 11 Kabupaten/Kota memperoleh Opini dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan persentase 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan sasaran strategis Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yaitu meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Badan Keuangan Daerah mempunyai Unit Pelaksana Teknis yang tugas dan kedudukannya melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dibidang Pajak, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi melalui UPTD PPD Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terus melakukan Peningkatan Kualitas dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat karena pada hakekatnya tugas pokok pemerintah adalah memberikan Pelayanan pada Masyarakat, untuk mengetahui kualitas dalam pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melaksanakan Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik secara berkala melalui penyusunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang digunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan dalam meningkatkan kualitas



Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) berisi data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara Kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan membandingkan harapan dan kebutuhan.

Dalam semester II Tahun 2019 dalam laporan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Badan Keuangan melakukan survey dengan hasil mutu pelayanan berdasarkan Indeks sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
Kategori Mutu Pelayanan

NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25, 00- 64,99	D	Tidak Baik
65,00- 76,60	C	Kurang
76,61- 88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Dari keseluruhan Kuisiner ( 300 Kuisiner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut, dari hasil pengolahan terhadap kuisiner yang telah terisi tersebut diperoleh hasil berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh hasil Skor **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 81.05** dengan angka Indeks sebesar B, maka Kinerja Unit Pelayanan ini berada dalam Mutu Pelayanan B dengan Kategori Baik, Karena berada dalam nilai Interval Indeks Kepuasan Masyarakat: **76,61- 88,2330** Perolehan Penilaian tergambar dalam Tabel 2 :



**Tabel 2.5**

Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
9 Unsur Pelayanan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Persyaratan Pelayanan	3,58
2	Prosedur Pelayanan	3,393
3	Waktu Pelayanan	3,353
4	Biaya/Tarif	3,379
5	Produk/Hasil Pelayanan	3,602
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,771
7	Prilaku Petugas Pelayanan	3,788
8	Maklumat Pelayanan	3,871
9	Mekanisme Pengaduan Pelayanan	3,685



**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Per UNSUR LAYANAN  
PADA KANTOR UPTD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (PPD) SE PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

No	UPTD PPD	UNSUR PELAYANAN									NRP TTB	IKM/ UNIT	MUTU PELAYANAN	KET
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KOTA JAMBI	0,382	0,355	0,327	0,374	0,34	0,325	0,37	0,374	0,479	3,326	83,15	B	BAIK
2	KAB. MA. JAMBI	0,34	0,327	0,316	0,311	0,389	0,385	0,37	0,37	0,407	3,215	80,375	B	BAIK
3	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0,392	0,321	0,342	0,321	0,377	0,389	0,377	0,377	0,35	3,2456	81,14	B	BAIK
4	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	0,319	0,366	0,329	0,335	0,315	0,4	0,366	0,389	0,382	3,201	80,025	B	BAIK
5	KAB. BATANG HARI	0,322	0,322	0,334	0,339	0,377	0,363	0,381	0,3805	0,3910	3,2095	80,238	B	BAIK
6	KAB. TEBO	0,396	0,337	0,33	0,352	0,371	0,377	0,381	0,385	0,337	3,266	81,65	B	BAIK
7	KAB. SAROLANGUN	0,318	0,365	0,388	0,321	0,38	0,381	0,385	0,381	0,303	3,222	80,55	B	BAIK
8	KAB. MERANGIN	0,368	0,329	0,327	0,347	0,366	0,389	0,392	0,363	0,325	3,206	80,15	B	BAIK
9	KAB. BUNGO	0,396	0,326	0,323	0,359	0,321	0,385	0,377	0,474	0,322	3,283	82,075	B	BAIK
10	KAB. KERINCI	0,347	0,345	0,337	0,32	0,366	0,377	0,389	0,377	0,39	3,2470 7	81,176	B	BAIK
JUMLAH IKM PER CPPD		3,58	3,393	3,353	3,379	3,602	3,771	3,788	3,871	3,685	32,421	810,5		
IKM UNIT PELAYANAN BAKEUDA PROVINSI JAMBI												81,05	B	BAIK

---

## **1.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

Semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Pusat yang bersih dan akuntabel serta Pemerintah Daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah sehingga terwujud kesatuan bangsa baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, telah diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Dalam melaksanakan Tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pengelolaan Keuangan tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dewasa ini, kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan umumnya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan sebagai berikut :



1. Kewenangan beberapa samsat di Kabupaten/Kota masih belum optimal karena beberapa samsat belum ditingkatkan menjadi samsat penuh
2. Kualitas dan kuantitas SDM masih harus ditingkatkan
3. Belum sempurnanya sistem aplikasi komputerasi samsat dan belum tersedianya aplikasi pendapatan
4. Daya beli masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak kepada penerimaan Pajak Daerah
5. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
7. Belum Tertibnya Surat Pertanggung Jawaban
8. Penyampaian Bukti Pembayaran Pajak Kurang tertib
9. Peraturan dalam penganggaran selalu berubah-ubah
10. Jaringan Koneksi tidak Stabil sehingga jalannya aplikasi terhambat
11. Sarana dan Prasarana belum dan tidak memadai sehingga suasana kerja tidak nyaman



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 . Telaah Terhadap kebijakan Nasional**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam rangka menunjang dan membantu program kerja menuju suksesnya rencana strategis Provinsi Jambi, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi terus berupaya melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi meningkatkan pendapatan daerah serta tata kelola keuangan sesuai koridor dan peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan tata Kelola keuangan antara lain :

1. Meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan kerjasama dengan unsur – unsur terkait
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya
5. Meningkatkan kualitas manajemen serta membenahan sistem pengelolaan
6. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi merumuskan adanya peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan untuk terciptanya kemandirian daerah serta pengelolaan keuangan secara tertib, untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang tangguh, guna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat terpenuhinya pembangunan Provinsi Jambi yang merata



Guna mempertegas arah kebijakan yang akan di ambil oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, maka ada beberapa langkah dalam menentukan rumusan yang mengaitkan antara permasalahan pembangunan daerah dengan isu-isu strategis yang telah di formulasikan sebelumnya, sehingga dari permasalahan yang ada akan ditemukan jawaban sebagai sebuah solusi untuk dijadikan pokok-pokok pemikiran dalam perwujudan demi tercapainya cita-cita yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

### **3.2. Tujuan dan sasaran**

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memegang peranan penting dalam pembangunan serta sebagai ujung tombak dalam pembiayaan jalannya pembangunan di Provinsi Jambi dalam mengelola potensi-potensi yang akan menjadi sumber Pendapatan Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menjalankan hal tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sesuai tugas dan fungsinya mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan tujuan yang akan dicapai antara lain :

- ❖ Meningkatkan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana Perkantoran, Kualitas Kelembagaan, Tata laksana dan pelayanan adminitrasi perkantoran
- ❖ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabilitas dan partisipati
- ❖ Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah untuk pembiayaan pembangunan

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- ❖ Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM Sarana dan Prasarana Perkantoran, Kualitas Kelembagaan, Tata laksana dan pelayanan adminitrasi perkantoran
- ❖ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabilitas dan partisipatif
- ❖ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah



Tabel 3.1: Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capain setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun2	Tahun3	Tahun4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penyelesaian Admintrasi Perkantoran	89,63	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	NA	10	10	10	10	10	60
3	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	NA	10	10	10	10	10	60
4	Persentase Peningkatan Sumber daya Aparatur	NA	10	10	10	10	10	60
5	Nilai Sakip		bb	bb	bb	bb	bb	bb
6	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Persentase PAD	NA	5%	5%	5%	5%	5%	30%
8	Persentase Kab/Kota dengan Opini WTP	18%	27%	27%	38%	45%	45%	64%

### 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Rencana Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi untuk 1 tahun yaitu Tahun Anggaran 2021 terdiri Program dan Kegiatan Pokok dan rutinitas perkantoran, Program dan Kegiatan Lintas Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi serta kegiatan pendukung lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

#### A. Program dan Kegiatan Pokok

##### I. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3. Jasa Administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor



5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

## **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan pelatihan formal

## **V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

## **VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
2. Kegiatan Penatausahaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pendapatan
3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Pelaksanaan APBD
4. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
5. Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah



6. Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Tidak Langsung
7. Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
8. Kegiatan Pengelolaan Adminitrasi TUKD Belanja Langsung
9. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan dana perimbangan
10. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah
11. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK Provinsi Jambi
12. Kegiatan Adminitrasi TP-TGR
13. Kegiatan Pengelolaan Akuntansi Pendapatan
14. Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan Lain-lain
15. Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Retribusi Daerah
16. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Ke-Samsatan Pada UPT Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.
17. Kegiatan Penyusunan Peraturan Bidang Penganggaran
18. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke-Samsatan Pada UPTD PPD Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.pada Kab. Tanjab Barat
19. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke-Samsatan Pada UPTD PPD Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.pada Kab. Tanjab Timur
20. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke-Samsatan Pada UPTD PPD Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.pada Kab. Muaro Jambi
21. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke-Samsatan Pada UPTD PPD Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.pada Kab. Batang Hari
22. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke-Samsatan Pada UPTD PPD Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.pada Kab. Tebo.



23. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke-Samsatan Pada UPTD PPD Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.pada Kab. Bungo
24. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke-Samsatan Pada UPTD PPD Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.pada Kab. Merangin
25. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke-Samsatan Pada UPTD PPD Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.pada Kab. Sarolangun
26. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke-Samsatan Pada UPTD PPD Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.pada Kab. Kerinci
27. Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke-Samsatan Pada UPTD PPD Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi.pada Kota Jambi
28. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pajak Daerah

## **VII. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota**

1. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota
2. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Perhitungan APBD Kab/Kota

## **B. Program dan Kegiatan Lintas Badan Keuangah Daerah Provinsi Jambi**

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai Koordinator Pendapatan Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan Tata kelola keuangan serta pendapatan daerah

Adapun langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah adalah melalui Intensifikasi dan Eksentifikasi untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan serta melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi dan mitra kerja, disamping itu juga dalam rangka peningkatan



pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan daerah diperlukan sarana dan prasarana, pelayanan publik, kualitas aparatur, dan peningkatan kualitas informasi

### **Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan Daerah**

Langkah-langkah yang dilaksanakan melalui insentififikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah :

- a. Melakukan sosialisasi peraturan perpajakan dan menghimbau wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku melalui media elektronik, media cetak, baliho, brosur dan spanduk
- b. Melakukan pemuktahiran data wajib pajak, dan objek pajak
- c. Melaksanakan program pemutihan Pajak
- d. Melaksanakan Razia kendaraan bermotor secara simultan
- e. Mengoptimalkan pelayanan-pelayanan pajak kendaraan bermotor antara lain :
  - Samsat LINK (online) di 11 UPTD PPD Kabupaten/Kota
  - Samsat Drive Thru
  - Pengoprasian Gerai Samsat
  - Pengoprasian samsat Keliling
  - Pengoprasian pos-pos pembantu samsat pada daerah jaraknya jauh

Langkah-langkah yang dilaksanakan melalui Eksentifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah :

- Melakukan Raker/Rakor Tim Pembina samsat
- Melakukan koordinasi baik kePemerintah Pusat maupun ke Pemerinta Daerah yang telah berhasil dalam meningkatkan Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah



---

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perkembangan Pandemi Covid-19 di Indonesia diperkirakan pada Tahun 2022 masih berlangsung dan masih berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro.

Faktor lain yang juga memberatkan yaitu beban Keuangan yang ditanggung oleh masyarakat khususnya pada tingkatan ekonomi menengah kebawah semakin terasa . Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi juga telah melakukan kebijakan penyesuaian yang menitik beratkan pada program penanggulangan dampak yang diakibatkan Pandemi Covid-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang ( PERPU ) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Negara



---

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi membuat rumusan rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 dengan menyesuaikan antara kebutuhan dengan proyeksi anggaran yang tersedia

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada lampiran



**Tabel4.1 : Rumusan Rencana Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Tahun Anggaran 2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN</b>				<b>1.107.302.087.699,-</b>				<b>1.163.325.726.772</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>NILAI SAKIP</b>			<b>110.604.514.273,-</b>				<b>140.599.302.362</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>11 Dokumen</b>	<b>479.667.239</b>			<b>11 Dokumen</b>	<b>888.767.411</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	Jambi	6 Dokumen	214.278.746	PAD		6 Dokumen	278.562.370
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	Jambi	5 Dokumen	265.388.493	PAD		5 Dokumen	345.005.041
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi	Jambi			PAD		4 Kali	265.200.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Perangkat Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>93.776.922.741</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>103.154.615.200</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Periode Penyediaan Gaji	Jambi	14 Bulan	92.937.172.007	PAD		14 Bulan	102.230.889.300



**Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Jambi**

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Periode pembayaran penatausahaan keuangan honorarium	Jambi	12 Bulan	754.118.420	PAD	12 Bulan	829.530.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	Jambi	2 Laporan	85.632.314	PAD	2 Laporan	94.195.600
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>5.897.205.775</b>		<b>100%</b>	<b>1.013.440.495</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Jambi	6 Dokumen	550.000.681	PAD	6 Dokumen	110.000.136
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jenis BMD yang diasuransikan	Jambi	100 BMD	2.072.216.566	PAD	100 BMD	414.443.313
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi	1 Dokumen	214.996.484	PAD	1 Dokumen	128.997.890
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah OPD yang dibina	Jambi	43 OPD	899.999.389	PAD	43 OPD	179.999.878
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	Jambi	4 Dokumen	899.996.387	PAD	4 Dokumen	179.999.277
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD dan tersediannya Dokumen Penghapusan dan Pemindahantanganan Aset/BMD Pemprov Jambi	Jambi	100%	1.259.996.268	PAD		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah</b>		<b>100%</b>	<b>51.870.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.057.870.000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Jambi	10 Asn	51.870.000	PAD	10 Asn	51.870.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas	Jambi	307 Stel		PAD	540 Stel	351.000.000
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan	Jambi			PAD	20	80.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Sarana dan Prasarana	Jambi			PAD	100%	250.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Junmlah Evaluasi	Jambi			PAD	4 TW	150.000.000



Kinerja Pegawai								
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jambi				PAD	4 Kali	175.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>3.015.764.558</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>5.127.818.728</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jambi	683 Komponen	232.400.000		PAD	683 Komponen	255.640.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jambi				PAD		1.805.659.628
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peserta Rapat/Tamu dll	Jambi	600 Tamu	774.005.788		PAD	600 Tamu	851.406.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jambi	5 Dokumen	1.313.941.690		PAD	5 Dokumen	1.445.335.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Jambi	6 Bahan Bacaan	133.790.080		PAD	6 Bahan Bacaan	147.169.100
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu	Jambi	100 Tamu	144.600.000		PAD	100 Tamu	159.060.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Jambi	12 Kali	417.027.000		PAD	12 Kali	463.547.700
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>1.505.659.628</b>				<b>21.255.659.628</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jambi		1.505.659.628		PAD		1.505.659.628
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jambi				PAD		9.000.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jambi				PAD		10.750.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>2.295.693.332</b>				<b>2.525.262.800</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat kantor	Jambi	1000 Surat	67.643.900		PAD	1000 Surat	74.408.300
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening	Jambi	12 Bulan	1.311.771.300		PAD	12 Bulan	1.442.948.500



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pembayaran jasa pelayanan umum kantor	Jambi	12 Bulan	916.278.132	PAD	12 Bulan	1.007.906.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>		<b>100%</b>	<b>3.581.731.000,-</b>			<b>5.575.868.100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(unit)	Jambi	300 Unit	1.487.240.000	PAD	300 Unit	1.635.964.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (unit)	Jambi	300 Unit	0	PAD		1.635.964.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jambi	100 Unit	336.070.000	PAD	100 Unit	369.677.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	Jambi	11 Gedung	1.758.421.000	PAD	11 Gedung	1.934.263.100
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Opini BPK</b>	Jambi		<b>979.817.419.454</b>			<b>997.186.782.905</b>
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu</b>			<b>2.763.652.748</b>			<b>2.943.059.653</b>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen	Jambi	4 Dokumen	296.502.250	PAD	4 Dokumen	311.327.363
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	Jambi	2 Pergub dan 2 Perda	1.532.665.150	PAD	2 Pergub dan 2 Perda	1.609.298.408
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang disusun	Jambi	1 Regulasi	239.989.764	PAD	1 Regulasi	263.988.740
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jambi	11 Koordiansi	196.166.884	PAD	11 Koordiansi	210.283.572
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jambi	11 Koordiansi	292.000.000	PAD	11 Koordiansi	321.200.000



Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah OPD yang dibina	Jambi	43 OPD	206.328.700	PAD	43 OPD	226.961.570
<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Kab/Kota yang disusun tepat waktu</b>			<b>939.798.651</b>			<b>1.159.505.465</b>
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Gubernur Jambi tentang Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota	Jambi	11 SK	285.249.448	PAD	11 SK	313.774.393
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Gubernur Jambi tentang Hasil Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota	Jambi	11 SK	235.459.372	PAD	11 SK	259.005.309
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi	Jambi	11 Evalausi	221.819.906	PAD	11 Evalausi	310.547.868
Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPD dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jambi	11 LKPD	197.269.925	PAD	11 LKPD	276.177.895
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi Perbendaharaan Daerah</b>			<b>1.273.582.274</b>			<b>1.743.929.064</b>
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi	Jambi	43 OPD	242.475.472	PAD	43 OPD	315.218.114
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Anggaran Kas dan SPD yang diterbitkan	Jambi	5000 SPD	364.164.720	PAD	5000 SPD	460.560.000
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Koordinasi	Jambi	4 Kali	507.708.902	PAD	4 Kali	602.700.950



Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan	Jambi		159.233.180	PAD		365.450.000
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>			<b>704.588.527</b>			<b>810.403.955</b>
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan beban yang dilaksanakan	Jambi	43 OPD	153.265.400	PAD	43 OPD	176.255.210
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah perda dan perkara penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jambi	1 Perda dan Perkada	276.933.050	PAD	1 Perda dan Perkada	332.319.660
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen TLHP BPK	Jambi	1 Dokumen	103.475.935	PAD	1 Dokumen	113.823.529
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen	Jambi	2 Dokumen	55.048.100	PAD	2 Dokumen	60.552.910
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis perasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Kebijakan dan Panduan Teknis yang disusun	Jambi	1 kebijakan	115.866.042	PAD	1 kebijakan	127.452.646
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>973.740.330.100</b>			<b>990.094.870.899</b>
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	jumlah dokumen	Jambi	1 Dokumen	2.059.429.103	PAD	1 Dokumen	147.102.079
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah dokumen	Jambi	1 Dokumen	93.720.000.000	PAD	1 Dokumen	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang disalurkan	Jambi	100%	260.345.822.301	PAD	100%	310.571.182.254



**Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Jambi**

	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Persentase penyaluran Dana bagi Hasil Provinsi	Jambi	100%	617.615.078.696	PAD		100%	679.376.586.566
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>			<b>395.467.154</b>				<b>435.013.869</b>
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	jumlah PD yang dibina	Jambi	43 OPD	395.467.154	PAD		43 OPD	435.013.869
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>								<b>7.488.476.815</b>
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi			PAD		43 OPD	277.956.961
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Periode Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi			PAD		1 Tahun	427.956.961
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Periode Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi			PAD		1 Tahun	527.956.961
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Perioe RKBMD Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi			PAD		1 Tahun	360.976.933
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan BMD OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi			PAD		43 OPD	727.956.961
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi BMD OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi			PAD		43 OPD	622.692.358
	Pengamanan Barang Milik Daerah	-Jumlah Pengamanan BMD Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi			PAD		43 OPD	2.150.173.517
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Hasil Penilaian BMD Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi			PAD		43 OPD	289.578.993
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi BMD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi			PAD		43 OPD	311.776.985
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jambi			PAD		43 OPD	539.076.637
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi			PAD		43 OPD	277.956.961



**Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Jambi**

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi				PAD		43 OPD	527.956.961
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan, Sosialisasi/Rakor/Bimtek Pengelolaan BMD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi	Jambi				PAD		Pem Prov dan Kab.kota	446.459.626
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah</b>				<b>16.880.153.972</b>				<b>18.051.164.690</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Pendapatan Daerah yang diolah</b>				<b>16.880.153.972</b>				<b>18.051.164.690</b>
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah laporan	Jambi	12 Laporan	995.923.066		PAD		12 Laporan	1.045.719.219
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jambi	12 Kali	6.544.215.335		PAD		12 Kali	6.805.983.948
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis penyediaan Sarana dan Prasarana pada UPTD PPD	Jambi	11 Kab/kota	4.627.169.204		PAD		11 Kab/kota	4.858.527.664
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Kab/kota dengan Sistem Kesamsatan yang dipelihara	Jambi	11 Kab/kota	3.107.947.335		PAD		11 Kab/kota	3.574.139.435
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pelayanan penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok	Jambi	12 kali	566.595.708		PAD		12 kali	624.671.768
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan	Jambi	4 Triwulan	465.848.196		PAD		4 Triwulan	512.433.016
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah PD Pengelolaan Retribusi Daerah yang dibina dan diawasi	Jambi	18 OPD	572.455.128		PAD		18 OPD	629.689.640



## BAB V PENUTUP

Pembangunan adalah perubahan yang bersifat dinamis (*a dynamic change*), Pembangunan bertujuan melaksanakan perubahan, tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau pada suatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh masyarakat (*a whole society*), seluruh wilayah, perubahan itu berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan yang belum baik menuju perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pada hakekatnya, pembangunan yang paling utama adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan prasarana dan sarana dilakukan hanya untuk menunjang kegiatan manusia dalam pembangunan. Pembangunan berlangsung selalu berubah. Dalam hal ini, pembangunan tidak hanya menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam masyarakat yang berubah itu, tetapi juga berperan untuk melakukan perubahan atau mengarahkan perubahan tersebut. Untuk itu, diperlukan instrumen dan strategi yang harus sesuai dengan kelompok sasaran (*target group*) dan strategi induk yang dipilih

Karena pembangunan meliputi seluruh masyarakat, pembangunan mencakup berbagai sisi kehidupan maka diperlukan perencanaan yang baik dan berkesinambungan.

Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2021. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Rencana ini akan dijadikan pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi , serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Bakeuda tahun 2021. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bakeuda Provinsi Jambi tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Jambi, 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAERAH PROVINSI JAMBI**

**AGUS PIRNGADI,S.sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19691215 199003 1 005**